

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera serta memiliki pekerjaan yang tetap sehingga dapat menunjang kehidupannya yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Namun hanya sedikit orang yang tidak memiliki banyak pilihan dikarenakan pendidikan yang rendah, cacat, kurangnya keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) dan hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas. Faktor tersebut diakibatkan oleh kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kerap bahkan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksudkan lebih cenderung kepada kebutuhan pokok yaitu berupa sandang, pangan dan papan (Nurwati, 2008).

Kemiskinan menjadi salah satu alasan khususnya penduduk desa melakukan perpindahan ke kota yang memiliki perekonomian dan perindustrian yang lebih maju untuk mencari pekerjaan dan menetap di kota. Sehingga pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan tidak seimbang dengan ruang yang ada dan peluang pekerjaan di perkotaan. Persaingan hidup yang keras di perkotaan, membuat mereka yang tidak memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi akan kehilangan peluang dengan kehidupan yang semestinya, sehingga hal

tersebut menjadi permasalahan bagi mereka. Hasilnya mereka akan memilih untuk menggelandang dan meminta-minta.

Fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia sering dijumpai di lingkungan sekitar khususnya di daerah perkotaan yang berkumpul di fasilitas-fasilitas umum, traffic light bahkan masuk di wilayah kampus dan pemukiman warga yang menjadi lokasi mangkal pengemis yang sekaligus menggelandang. Mudah-mudahan mencari uang di kota besar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib (Anggriana & Dewi, 2016).

Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis diperkirakan masih ada sekitar 77.500 yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia di tahun 2019 ini, tetapi jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan karena agak sulit mendata populasi gelandangan dan pengemis apalagi naik pada saat hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari raya idul adha (<https://nasional.kompas.com>).

Penduduk Indonesia di kota masih banyak yang suka memberikan uang kepada pengemis, sehingga pengemis yang sekaligus menggelandang menjadi kecanduan, karena ia memahami bahwa mendapatkan uang cukup dengan menadahkan tangan atau mengetuk kaca mobil, ia akan mengulang hal yang sama pada keesokan harinya. Hasilnya mereka memiliki pemikiran bahwa mereka bisa mendapatkan uang secara gampang dan instan. Menggelandang dan mengemis menjadi kepuasan bagi seseorang mendapatkan uang secara instan dan dapat

memenuhi kebutuhannya, membuat mereka membawa sanak saudaranya dari desa ke kota untuk menjadi gelandangan sekaligus mengemis. Sehingga gelandangan di kota-kota besar Indonesia semakin banyak khususnya saat bulan Ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, dimana mereka hidup bebas dijalan, santai, kumpul kebo dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum sehingga meresahkan masyarakat. Menurut Merlinda dan Hati (2015) hal tersebut diakibatkan karena gelandangan dan pengemis tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan tidak adanya kemandirian.

Sikap mental dalam melakukan penyesuaian diri di berbagai situasi menjadi faktor seseorang menggelandang. Tursilarini (2013) menjelaskan bahwa Gangguan emosional dan kekalutan mental banyak muncul pada masa transisi dimana terjadi perubahan era globalisasi yaitu era agraris menuju era industrialisasi. Sehingga mereka terpinggirkan, ketidakmampuan dan keterbatasan relasi, keterbatasan afeksi/spiritual, keterbatasan modal dan sebagainya membuat mereka akan terus dalam lingkaran kegagalan berusaha.

Pemerintah bersama masyarakat dapat berperan dalam menanggulangi masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial agar gelandangan dan pengemis dapat berfungsi kembali. Hasil Penelitian Anggriana dan Dewi (2016) tentang Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, mereka

menjekaskan bahwa gelandangan dan pengemis setelah dibina cenderung kembali ke masyarakat dengan menggelandang dan melakukan aktivitas seperti dulu. Hal tersebut karena gelandangan dan pengemis pada saat mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial ia memiliki persepsi atau pandangan yang tidak benar atau tidak baik terhadap rehabilitasi sosial sehingga ia tidak dapat menangkap dan memaknai pelayanan rehabilitasi sosial yang sangat berpengaruh bagi mereka untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga mereka tidak menggelandang dan mengemis kembali serta diakibatkan mengenai keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis menemukan bahwa kebingungan dan kecemasan gelandangan dan pengemis pasca rehabilitasi masih sering terjadi, ketidaksiapan mental untuk kembali di tengah-tengah masyarakat menyebabkan mereka bingung mau kemana setelah mereka keluar panti.

Masalah mendasar gelandangan dan pengemis setelah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial selain itu juga bahwa hasil penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis menurut Priharyono (2008). keterbatasan mereka terhadap permodalan ataupun akses terhadap aset yang dapat dilakukan untuk memulai usaha karena bantuan stimulan yang diberikan lembaga relatif kecil sehingga ia tidak mandiri.

Data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial, tidak lepas dari persepsi gelandangan dan pengemis tentang pelayanan rehabilitasi sosial yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kemandirian mereka. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti sikap, motivasi, kepentingan atau

minat, pengalaman dan pengharapan dan juga dilihat dari umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan kepribadian dan pengalaman hidup individu.

Kemandirian ditentukan oleh persepsi gelandangan dan pengemis atas pelayanan yang telah diberikan apakah bisa memenuhi harapan dan dapat mengubah pola pikir mereka bahwa rehabilitasi sosial merupakan program untuk membantu mereka mengembalikan keberfungsian sosial mereka bukan penjara bagi mereka sehingga bisa memenuhi harapan mereka dan dapat hidup normatif kembali di lingkungan masyarakat serta mereka dapat mandiri dalam arti dapat mengatasi masalahnya, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, dapat menentukan nasibnya sendiri, percaya diri dan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Masalah lain yang menjadi penyebab meningkatnya gelandangan dan pengemis, antara lain keterbatasan pelayanan rehabilitasi sosial yang tak sebanding dengan jumlah gelandangan dan pengemis dan kurangnya lembaga yang mampu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, sehingga untuk menunjang agar gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial hanya dengan waktu yang singkat dan diberikan pelayanan rehabilitasi tingkat dasar dengan begitu perlu rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI agar gelandangan dan pengemis memiliki kapabilitas sosial dan dapat mandiri serta dapat hidup normatif

dalam kehidupan masyarakatnya.

Pelayanan rehabilitasi sosial dianggap mampu memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis, karena dapat memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran diri serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dengan begitu dia dapat hidup mandiri dalam kehidupan masyarakatnya.

Pemerintah melalui Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi sebagai program rehabilitasi tingkat lanjut atau bimbingan keterampilan lanjut yang bertujuan membantu memulihkan kehidupan yang normal di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan berbasis kemitraan yang dilaksanakan melalui terapi sosial dan penghidupan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga kedepannya ia mampu mengangkat derajat hidup masing-masing dan dapat hidup mandiri serta tidak kembali ke jalan untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

Topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “studi untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial dan yang memerlukan pelayanan sosial”. (Soeharto, 2015:15). Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada “Hubungan Antara Persepsi Eks Gelandangan dan Pengemis tentang Rehabilitasi Sosial dengan Kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Eks Gelandangan dan Pengemis tentang Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi?
2. Bagaimana Kemandirian Eks Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi?
3. Bagaimana Hubungan Antara Persepsi Eks Gelandangan dan Pengemis tentang Rehabilitasi Sosial dengan Kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan tentang Hubungan Antara Persepsi Eks Gelandangan dan Pengemis tentang Rehabilitasi Sosial dengan Kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.
2. Untuk mendeskripsikan kemandirian eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ilmiah fenomena sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dan kemandirian di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.
2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat dan pemerintah sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dan kemandirian di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan sosial sebagai konsep yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Seseorang akan sejahtera bukan hanya terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan tetapi pendidikan dan kesehatan juga harus terpenuhi, sehingga seseorang berada dalam keberadaan sejahtera. Seperti yang diungkapkan oleh Walter A. Friedlander dalam Fahrudin (2012: 9) mengenai konsep kesejahteraan sosial, yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial yang sejahtera dilihat dari individu dan kelompok dapat mencapai standar hidup yang baik, dimana terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sehingga mereka dapat melaksanakan peran sosial dalam masyarakatnya dan relasi sosial dengan lingkungannya. Dari tujuan tersebut diharapkan individu dapat mendapatkan pelayanan dan institusi untuk mencapai kehidupan yang layak serta meningkatkan kemampuan individu sehingga mereka dapat melaksanakan peran sosial dalam masyarakatnya.

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki kedudukan utama yang bentuk intervensi sosialnya mencangkup tujuan utama dan langsung kepada upaya meningkatnya kesejahteraan individu maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan upaya pencegahan, penyembuhan, pengembangan dan penunjang terhadap dampak dari masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia,

perbaikan kualitas hidup manusia dan pelayananan sosial. Menurut Suharto (2009:1) yang dikutip dari Zastrow, sebagai berikut:

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian di atas menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk membantu menangani masalah sosial serta hambatan untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka. Selain itu, pekerja sosial dituntut mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang kondusif dengan melakukan kerja sama dengan berbagai sumber untuk mencegah hambatan-hambatan dalam masyarakat untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka.

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat dimana kondisi yang muncul tersebut sangat tidak diharapkan, sehingga kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identitas. Masalah Sosial menurut Soetomo (2013:1), yaitu:

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku.

Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu kondisi yang bisa dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan, nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masyarakat

sehingga menghalangi masyarakat untuk melakukan atau menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan itu terjadinya suatu kondisi dalam masyarakat yang menyebabkan orang atau system tidak berfungsi secara sosial dan dimana perlu upaya untuk mengatasinya agar dapat meningkatkan dan mengembalikan keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial menurut Siporin dalam Fahrudin (2014:62), yaitu “merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”.

Pengertian di atas menyatakan bahwa seseorang dikatakan berfungsi apabila individu, keluarga, perkumpulan, komunitas menjalankan peran-peran kehidupannya sesuai dengan status sosial dimana sesuai dengan nilai, norma dan khaidah dalam lingkungan masyarakat serta terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menunjang hal tersebut perlu diadakannya pelayanan sosial sebagai aktivitas untuk dapat membantu mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Definisi pelayanan sosial menurut menurut Kahn dalam Fahrudin (2012 : 51), yaitu:

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan Lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Definisi di atas menyatakan bahwa pelayanan sosial merupakan kegiatan yang difokuskan sebagai pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial mereka dan pertolongan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang tidak

dapat melaksanakan fungsi sosial mereka salah satunya melalui sumber-sumber sosial pendukung atau program-program yang telah disediakan salah satu pelayanan sosial yang meliputi kepentingan umum yakni rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (8) Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa: “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

Definisi Rehabilitasi Sosial pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya atau melaksanakan peran dan status dalam kehidupannya secara wajar di kehidupan masyarakat sebagai tindakan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mencapai kesejahteraan sosial dilakukannya rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya agar mereka mandiri.

Pemerintah memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial sebagai penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial tingkat dasar merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial seseorang dan rehabilitasi sosial tingkat lanjut merupakan upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang sehingga memiliki kapabilitas

sosial, mandiri dan dapat hidup normatif. Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial yaitu gelandangan dan pengemis. Pengertian gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Pengertian tersebut terkandung pemahaman bahwa gelandangan dan pengemis merupakan seseorang hidup mengembara di tempat umum yang sekaligus mengemis sehingga hidupnya tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat sehingga mereka perlu mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial baik rehabilitasi sosial tingkat dasar dan dilanjutkan rehabilitasi tingkat lanjut agar mereka dapat mengembangkan keberfungsian sosial dan dapat mengubah pola perilaku dan pemikiran yang sesuai dengan ajaran agama mereka sehingga mereka dapat mandiri.

Meningkatkan kualitas pelayanan sosial terhadap gelandangan dan pengemis tentunya ini menjadi pemicu gelandangan dan pengemis untuk memberikan persepsi

atau sudut pandangnya kepada pelayanan rehabilitasi sosial terhadap kemandirian kepada lembaga tersebut. Desmita (2017:187), mengemukakan:

pandangan seseorang tentang berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengitarinya dengan proses menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang diterima oleh sistem alat indera manusia yang menimbulkan makna dalam prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan yang tidak penting sehingga individu memiliki kemampuan kemandirian.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, tergambar bahwa suatu persepsi akan menimbulkan reaksi seseorang untuk dapat mandiri pada keadaan yang telah ia persepsikan. Meskipun individu memiliki anggapan masing-masing tentang makna dari suatu objek, namun setiap individu berhak untuk menyelaraskan anggapan pada sebuah tindakan. Keberadaan pelayanan rehabilitasi sosial menimbulkan pandangan-pandangan yang berbeda-beda dari setiap orang, begitu juga dengan pandangan para eks gelandangan dan pengemis. Pandangan-pandangan yang timbul dari diri seseorang tanpa paksaan dari pihak luar disebut persepsi, adapun pengertian persepsi yang dikemukakan oleh Rakhmat (2015:50), yaitu:

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna kepada stimulus indrawi (*sensory stimuli*).

Definisi di atas menyatakan bahwa pandangan seseorang terhadap suatu objek akan berbeda dikarenakan setiap orang memiliki kejadian yang telah dialaminya pun berbeda sehingga dalam menangkap dan memaknai objek pun berbeda, hal tersebut dirasakan bagaimana informasi yang diperoleh dari panca indra kita dikaitkan dengan pengalaman atau peristiwa masuk ke dalam lingkungan kita sehingga dapat

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan serta memperoleh pandangan atau pemaknaan tentang suatu objek terhadap stimulus yang diberikan.

Persepsi atau pandangan yang dikeluarkan oleh setiap individu akan berbeda dengan yang lainnya, begitu juga dengan persepsi setiap individu tentang pelayanan rehabilitasi sosial. Persepsi yang baik terhadap pelayanan rehabilitasi sosial akan menimbulkan keinginan seseorang untuk menjadi mandiri dan diikuti dengan keikutsertaan dalam kegiatan rehabilitasi sosial sehingga dia memiliki pengalaman atau peristiwa masuk ke dalam lingkungannya dan informasi yang diperoleh melalui panca indra tentang rehabilitasi sosial dengan begitu dapat menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan serta memperoleh pandangan tentang rehabilitasi sosial terhadap stimulus yang diberikan. Definisi kemandirian menurut Hoffnung (1994) yang dikutip dari Desmita (2017:185) menyatakan bahwa:

“the ability to govern and regulate one’s own thoughts, feelings, and actions freely and responsibly while overcoming feelings of shame and doubt dengan demikian dapat dipahami bahwa kemandirian atau otonomi adalah kemampuan untuk mengendalikan atau mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa individu, kelompok dan masyarakat memiliki kesempatan sosial untuk mengembangkan dan merealisasikan potensinya yang ada dalam dirinya agar dia mandiri dengan ikut berpartisipasi dalam program atau pelayanan rehabilitasi sosial sehingga dia dapat memiliki kemampuan dalam mengendalikan atau mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri.

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Persepsi Eks Gelandangan dan Pengemis tentang Rehabilitasi Sosial dengan Kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi” adalah sebagai berikut:

1.5.1 Hipotesis Utama

H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

H1 : Terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi. Semakin baik persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial, maka semakin tinggi kemandiriannya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

1.5.2 Sub Hipotesis

1. H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur pikiran eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

- H1 : Terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur pikiran eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi. Semakin baik persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial, maka semakin tinggi kemampuan mengatur pikirannya eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.
2. H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur perasaan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.
- H1 : Terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur perasaan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi. Semakin baik persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial, maka semakin tinggi kemampuan mengatur perasaan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

3. H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur tindakan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

H1 : Terdapat hubungan antara persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial dengan kemampuan mengatur tindakan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi. Semakin baik persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial, maka semakin tinggi kemampuan mengatur tindakan eks gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

1.6 Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dengan memulihkan dan mengembangkan seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini rehabilitasi sosial

diselenggarakan salah satunya di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

2. Gelandangan dan Pengemis merupakan masalah sosial karena ia hidup mengembara di tempat umum yang sekaligus mengemis sehingga hidupnya tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat sehingga gelandangan dan pengemis harus dipecahkan sebagai masalah sosial dengan diberikan pelayanan rehabilitasi sosial tingkat dasar dan dilanjutkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan pengemis (BRSEGP) Bekasi.
3. Persepsi adalah pengalaman eks gelandangan dan pengemis dalam penerima pelayanan rehabilitasi sosial ketika menerima materi tentang rehabilitasi sosial, mempraktekkan terapi rehabilitasi sosial dan pengalaman eks gelandangan dan pengemis dalam mendapatkan informasi tentang pelayanan rehabilitasi sosial sehingga informasi tersebut bisa disimpulkan
4. kemandirian adalah kebebasan manusia untuk memilih, memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri sehingga dengan begitu ia dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran dalam arti ia mampu mengekspresikan ide atau gagasannya, kemampuan mengatur perasaannya dalam arti ia dapat mengendalikan emosi serta percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur tindakannya dalam arti ia bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat serta berusaha untuk mengatasi permasalahan dan tugas-tugas kehidupannya.

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

| Varibel | Dimensi | Indikator | Item pertanyaan |
|---|--|---|---|
| Variabel x: persepsi eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial | 1. Pengalaman eks gelandangan dan pengemis tentang rehabilitasi sosial | 1. Pengalaman ketika menerima materi tentang rehabilitasi sosial | 1. mengetahui fungsi rehabilitasi sosial 2. mengetahui tahapan kegiatan rehabilitasi sosial 3. mengetahui tujuan rehabilitasi sosial 4. mengetahui tentang pembelajaran potensi keterampilan |
| | 2. Pengalaman eks gelandangan dan pengemis | 2. Pengalaman ketika mempraktekan terapi rehabilitasi sosial 1. Pemeriksaa | 5. mengetahui tujuan praktek rehabilitasi sosial 6. kemampuan bekerja lebih efektif 7. kemampuan beretika yang baik 8. kemampuan menjadi masyarakat yang normatif 9. kemampuan mempertahankan keterampilan 10. kemampuan praktek berusaha/bekerja 11. kemampuan bekerja sama dengan orang lain 12. Check up kesehatan 13. Pemberian obat kesehatan 14. Pemenuhan kebutuhan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>di lingkungan sekitar balai</p> <p>3. Pengalaman tentang eks gelandangan dan pengemis dalam mendapatkan informasi</p> | <p>2. Activity of daily living</p> <p>1. Media</p> | <p>pangan</p> <p>15. Kebersihan pakaian</p> <p>16. Berhias</p> <p>17. Kebersihan badan/mandi</p> <p>18. Kebersihan area tempat tidur</p> <p>19. Pemberian informasi tentang rujukan penerimaan klien</p> <p>20. Pemberian informasi tentang penyaluran keterampilan</p> |
| <p>Variabel y: Kemandirian eks gelandangan dan pengemis</p> | <p>1. Kemampuan mengatur pikiran</p> <p>2. Kemampuan mengatur perasaan</p> <p>3. Kemampuan mengatur tindakan</p> | <p>1. Kemampuan mengekspresikan ide/gagasan</p> <p>1. kemampuan mengendalikan emosi</p> <p>2. kepercayaan diri</p> <p>1. Tingkah laku</p> | <p>21. Mengemukakan pendapat/ide yang telah didapat</p> <p>22. Perkembangan kreatifitas</p> <p>23. Memiliki rasa semangat dalam kehidupan</p> <p>24. Memiliki sikap optimis</p> <p>25. Mengontrol emosi</p> <p>26. Keahlian dan keterampilan dapat menunjang kehidupan</p> <p>27. Mampu menyesuaikan diri di lingkungan</p> <p>28. Interaksi di lingkungan</p> <p>29. Mampu mengatasi masalahnya sendiri</p> <p>30. Bertanggung jawab terhadap keluarganya</p> |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | 2. Relasi sosial | 31. Sopan santun 32. Tolong menolong 33. Mentaati peraturan 34. Hubungan dengan teman di lembaga 35. Hubungan dengan pekerja sosial di lembaga 36. Hubungan dengan petugas di lembaga |
|--|--|------------------|--|

Sumber penelitian, 2020

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soehartono (2015:9) adalah: “cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat atau fenomena yang diselidiki berupa penggunaan fasilitas dimasyarakat. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan iinterpretasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan untuk mendapatkan kesimpulan.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi

Studi dokumen menurut Soehartono (2015:70) yaitu: “Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian”. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mulai dokumen, arsip, koran, artikel-artikel atau bahan-bahan yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung dilapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung atau pengamatan berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan mudah mengamati kemunculan tingkah lakuyang diharapkan.
- b. Wawancara yaitu termasuk didalam jenis sekunder yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh eks gelandangan dan pengemis dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

c. Angket yaitu termasuk ke dalam jenis data primer yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar pertanyaan secara tertulis untuk di isi sendiri oleh responden diajukan langsung kepada responden, hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan responden.

1.7.3 Populasi dan Teknik Penarikan sampel

Populasi menurut Soehartono (2015: 57), yaitu: “Jumlah keseluruhan unit analisis, atau objek yang akan diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah eks gelandangan dan pengemis yang sedang menerima pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Simple Random Sampling menurut Soehartono (2015: 60), “Cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga dapat dilakukan dengan cara undian atau table bilangan random”. Populasi pada penelitian ini adalah eks gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial. Jumlah populasi 60 orang peserta tersebut, maka diambil sampel sebanyak 90% yaitu sebanyak 54 orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Bekasi.

1.7.4 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian skala ordinal menurut Suehartono (2015: 76), menyatakan bahwa :

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari pada golongan yang lain

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala model Likert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan keadaan atau sikap terhadap suatu objek tertentu yang dapat diukur. Skala model likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut:

- a. Kategori jawaban sangat tinggi diberi nilai 5
- b. Kategori jawaban tinggi diberi nilai 4
- c. Kategori jawaban sedang diberi nilai 3
- d. Kategori jawaban rendah diberi nilai 2
- e. Kategori jawaban sangat rendah diberi nilai 1

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka-angka yang dituangkan dalam tabel. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik dengan menggunakan uji Rank Spearman (r_s).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun skor yang diperoleh tiap responden dengan cara menggunakan masing-masing variabel
- b. Memberikan rangking pada variabel X dan variabel Y, mulai dari 1 sampai (1-n).
- c. Menentukan harga untuk setiap responden dengan cara mengurangi rangking antara variabel X dan variabel Y (hasil diketahui di)
- d. Masing-masing dikuadratkan dan seluruhnya dijumlah (diketahui $\sum di^2$)
- e. Melihat signifikan dilakukan dengan mendistribusikan r ke dalam rumus:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan:

T: Nilai signifikansi hasil perhitungan

N: Jumlah responden

R: Nilai kuadrat dari korelasi sperman

- f. Jika terdapat angka kembar

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 + \sum y^2}}$$

Tx dan Ty berturut-turut adalah banyaknya nilai pengamatan X dan banyaknya nilai pengamatan y yang berangka sama untuk suatu peringkat sedangkan rumus untuk Tx dan Ty sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| $T_x = \frac{t^3x - tx}{12}$ | $T_y = \frac{t^3y - ty}{12}$ |
|------------------------------|------------------------------|

- g. Membandingkan nilai t hitung tabel dengan melihat harga-harga kritis t dengan signifikan 5% pada derajat kebebasan (df) yaitu n-2.
- h. Jika tabel < t hitung maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis (H_1) diterima

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

- a. Merupakan balai yang menjadi pelaksanaan Program Rehabilitasi sosial Eks Gelandangan dan Pengemis.
- b. Tersedianya data yang diperlukan guna menunjang kelancaran dari penelitian.
- c. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian Kesejahteraan Sosial.

1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama 5 bulan terhitung sejak bulan November 2019 sampai Maret 2020, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap pelaporan.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

| No | Jenis kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|------|
| | | 2019-2020 | | | | |
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mart |
| Tahap Pra Lapangan | | | | | | |
| 1 | Penjajakan | | | | | |
| 2 | Studi Literatur | | | | | |
| 3 | Penyusunan Proposal | | | | | |
| 4 | Seminar proposal | | | | | |
| 5 | Penyusunan Pedoman Wawancara | | | | | |
| Tahap Pekerjaan Lapangan | | | | | | |
| 6 | Pengumpulan Data | | | | | |
| 7 | Pengolahan & Analisis Data | | | | | |
| Tahap Penyusunan Akhir | | | | | | |
| 8 | Bimbingan Penulisan | | | | | |
| 9 | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir | | | | | |
| 10 | Sidang Laporan Akhir | | | | | |

Sumber Tabel: Hasil Penjajakan Penelitian 2020